

ANALISIS KEMISKINAN RUMAH TANGGA SEKTOR INFORMAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

Maria Kewa¹, Yulianus Ronaldias¹

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata, Indonesia

*Korespondensi Penulis: E-mail address: maria.kewa@bps.go.id , yulianus.ronaldias@bps.go.id

ARTIKEL INFO

Abstract

Article history:

Received 20 Oct, 2025

Revised 22 Nov, 2025

Accepted 18 Dec, 2025

Published 31 Dec, 2025

Introduction: Households whose heads work in the informal sector tend to be more vulnerable to poverty. The informal sector plays a significant role in providing employment opportunities; **Background Problem:** however, jobs in this sector are generally unstable, low-paying, and lack social protection. These conditions make households engaged in the informal sector more likely to be trapped in the cycle of poverty. **Novelty:** This study aims to analyze the factors influencing the poverty status of households whose heads work in the informal sector in Nusa Tenggara Timur (NTT). **Research Method:** This study employed binary logistic regression analysis. **The results** of the binary logistic regression model estimation indicated that the variables significantly affecting the poverty status of informal-sector households in NTT included the classification of residential area, number of household members, age of the household head, highest educational attainment of the household head, main employment sector, number of working hours per week, internet access, ownership of a savings account, and ownership of household assets. Based on these findings, the government needs to accelerate the expansion of social protection programs such as employment insurance, health insurance, and social assistance. Access to financing should also be made easier. In addition, comprehensive policies in the agricultural sector must be implemented, including maintaining price stability, ensuring market access, and empowering farmers.

Keywords:

Poverty; Informal-Sector Household; Binary Logistic Regression

1. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, kemiskinan juga menjadi pusat perhatian dunia dan menjadi prioritas utama dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Menurut Suharto (2009) kemiskinan merupakan kondisi kekurangan materi yang membuat seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Meskipun di Indonesia angka kemiskinan terus menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir namun jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan

bukan sekedar persoalan ekonomi, tetapi juga fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan struktural.

Kemiskinan merupakan persoalan struktural yang masih melekat kuat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada tahun 2024, angka kemiskinan di Provinsi NTT sebesar 19,48 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1,13 juta jiwa. Meskipun tren menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan, namun secara nasional Provinsi NTT memiliki tingkat kemiskinan tertinggi keempat setelah provinsi Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Hal ini menunjukkan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam pembahasan kemiskinan adalah dominasi sektor informal dalam struktur ketenagakerjaan di Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan bahwa pekerja sektor informal memiliki probabilitas lebih tinggi untuk berada dalam kondisi miskin dibandingkan pekerja sektor formal (Fields, 2005; Chen, 2007; Gunawan, 2012; ILO, 2018; Setiawan & Santoso, 2020). Menurut Suryahadi dan Hadiwidjaja (2011), kepala rumah tangga berstatus pekerja informal memiliki kemungkinan dua kali lebih tinggi untuk tergolong miskin dibandingkan rumah tangga dengan kepala rumah tangga pekerja formal.

Tabel 1. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi NTT Tahun 2024

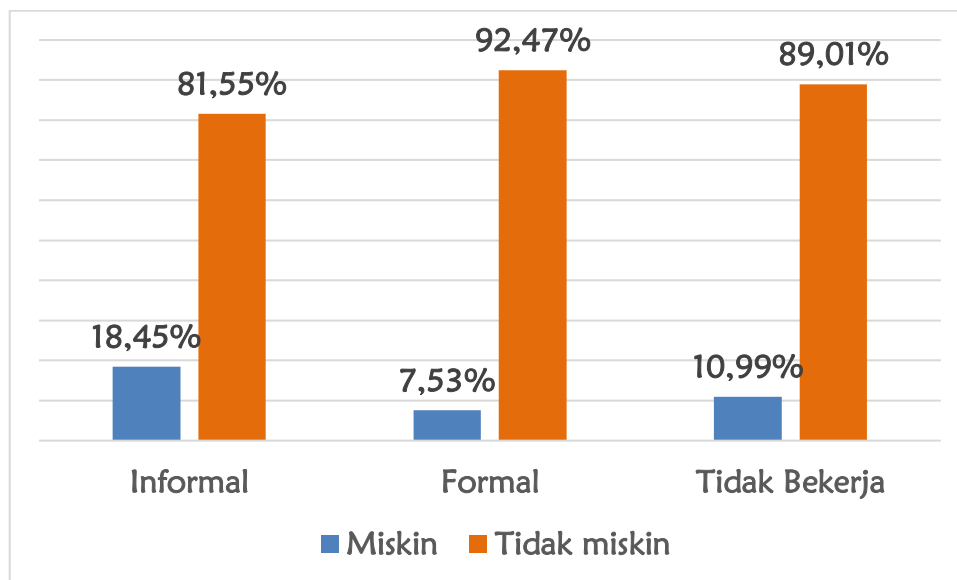
Status Pekerjaan	Daerah		Jumlah/Total
	Kota	Desa	
Formal	50,86	17,99	27,17
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3,08	1,07	1,63
Buruh/karyawan/pegawai	47,79	16,92	25,54
Informal	49,14	82,01	72,83
Berusaha sendiri	23,18	23,01	23,48
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	10,58	24,75	21,39
Pekerja Bebas	2,96	3,32	3,28
Pekerja tidak dibayar	12,41	30,92	24,67
Jumlah/Total	100	100	100

Sumber: Profil Ketenagakerjaan dan Pengangguran Provinsi NTT, 2024

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), status pekerjaan utama dari penduduk yang bekerja dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan kegiatan formal dan informal (BPS, 2025). Dimana kegiatan formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan/pegawai. Sedangkan kegiatan informal

mencakup kategori berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2024 pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah pekerja di Provinsi NTT didominasi oleh pekerja sektor informal. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya kesempatan kerja formal yang mampu memberikan jaminan pendapatan tetap dan perlindungan sosial. Proporsi pekerja informal di Provinsi NTT mencapai 72,83 persen dari total pekerja pada tahun 2024. Sedangkan sisanya merupakan pekerja formal yaitu sebesar 27,17 persen dari total pekerja. Sebagian besar penduduk Provinsi NTT bekerja di sektor informal seperti pertanian subsisten, nelayan tradisional, perdagangan kecil dan jasa non formal.

Menurut Hart (1973) yang pertama kali memperkenalkan istilah sektor informal menjelaskan bahwa sektor ini memang menyediakan lapangan pekerjaan alternatif, tetapi sebagian besar pekerjaannya bersifat subsisten dengan pendapatan rendah, sehingga berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan negara berkembang. Sektor informal berperan signifikan dalam menyediakan lapangan kerja, khususnya bagi kelompok berpendidikan rendah dan masyarakat yang tidak mampu mengakses pasar kerja formal. Namun demikian, pekerjaan di sektor ini umumnya bersifat tidak stabil, berpendapatan rendah, dan minim perlindungan sosial. Hal tersebut membuat rumah tangga sektor informal lebih rentan terjebak dalam lingkaran kemiskinan.



Sumber: BPS, Susenas Maret 2024, diolah

Gambar 1. Persentase Status Miskin Rumah Tangga Berdasarkan Sektor Pekerjaan Utama KRT di Provinsi NTT

Gambar 1 menampilkan persentase rumah tangga miskin di Provinsi NTT berdasarkan sektor pekerjaan utama kepala rumah tangga (KRT). Dari gambar tersebut terlihat bahwa persentase rumah tangga miskin pada sektor informal sebesar 18,4 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sektor formal dan tidak bekerja yang sebesar 7,5

persen dan 11,0 persen. Hal ini menunjukkan bahwa memang rumah tangga sektor informal di Provinsi NTT memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap kemiskinan.

Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan rumah pada rumah tangga sektor informal. Menurut Pulungan dan Haryanto (2024) terdapat beberapa faktor yang secara signifikan mempengaruhi kemiskinan rumah tangga sektor informal antara lain usia KRT, pendidikan KRT, akses internet, sektor pekerjaan, status pekerjaan, jumlah jam kerja, jumlah anggota rumah tangga (ART), jumlah ART bekerja dan akses terhadap kredit. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Damanik dan Zebua (2025) menunjukkan bahwa pekerja informal di daerah pedesaan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami kemiskinan dengan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan antara lain tingkat pendidikan, akses kredit, kepemilikan aset, jam kerja serta status perkawinan.

Masih tingginya tingkat kemiskinan pada rumah tangga sektor informal di Provinsi NTT menunjukkan perlunya intervensi yang holistik dalam upaya pengentasannya. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan memetakan karakteristik dan faktor-faktor penyebab kemiskinan dalam rumah tangga sektor informal. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi karakteristik kemiskinan serta menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga dengan KRT bekerja pada sektor informal di Provinsi NTT. Dengan mengetahui karakteristik dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan, diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan pada sektor informal di Provinsi NTT.

2. Metodologi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemiskinan rumah tangga sektor informal di Provinsi NTT. Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel status kota/desa, jenis kelamin, umur KRT, jumlah anggota rumah tangga, pendidikan KRT, lapangan usaha pekerjaan utama KRT, akses internet, kepemilikan rekening tabungan, jumlah jam kerja dan kepemilikan aset. Variabel dependen dari penelitian ini adalah status kemiskinan rumah tangga sektor informal yakni miskin dan tidak miskin. Penentuan status miskin rumah tangga didasarkan pada garis kemiskinan (GK) menurut wilayah perkotaan dan pedesaan. Suatu rumah tangga dikatakan miskin jika pengeluaran per kapita rumah tangga tersebut berada di bawah GK. GK perkotaan Provinsi NTT pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp638.261. Sedangkan GK pedesaan sebesar Rp488.995.

2.1. Bahan dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 yang dilaksanakan oleh BPS. Jumlah sampel susenas yang digunakan dalam melakukan penelitian ini sebanyak 9.150 rumah tangga yang bekerja di sektor informal tersebar di 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT.

2.2. Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan inferensia. Analisis deskriptif akan dilakukan untuk melihat gambaran karakteristik setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan analisis inferensia dilakukan analisis regresi logistik biner untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap kemiskinan rumah tangga pekerja informal dengan menggunakan program pengolahan *Statistical package for the sosial sciences (SPSS)* versi 25.

Regresi logistik biner adalah metode analisis yang bertujuan untuk menemukan model yang paling tepat dalam menjelaskan hubungan antara variabel respon yang bersifat diskrit atau kategorik dengan satu atau lebih variabel penjelas (Hosmer dan Lemeshow, 2013). Variabel penjelas dapat berupa data kategorik maupun numerik. Ketika variabel respon berkategorik biner, yaitu kategori yang menyatakan kejadian sukses ($Y = 1$) dan kategori yang menyatakan kejadian gagal ($Y = 0$), maka model regresi logistik yang tepat untuk digunakan adalah regresi logistik biner.

Penelitian ini menggunakan 10 variabel sehingga persamaan regresi logistik biner yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$g(x) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + \beta_{10} X_{10}$$

Dimana

- X_1 = klasifikasi wilayah
- X_2 = umur KRT
- X_3 = jenis kelamin KRT
- X_4 = jumlah ART
- X_5 = tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT
- X_6 = Lapangan usaha pekerjaan utama KRT
- X_7 = Jumlah jam kerja KRT selama seminggu
- X_8 = Akses Internet KRT
- X_9 = Kepemilikan rekening tabungan KRT
- X_{10} = Kepemilikan aset rumah tangga

Tahapan pemodelan regresi logistik dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Uji simultan (*overall test*)
Uji simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh keseluruhan variabel penjelas terhadap status kemiskinan rumah tangga sektor informal.
- 2) Uji parsial (uji Wald)
Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel penjelas terhadap status kemiskinan rumah tangga sektor informal.
- 3) Uji kesesuaian model (*goodness of fit*)

Uji kesesuaian model digunakan untuk membuktikan bahwa model regresi logistik biner yang dihasilkan sudah sesuai untuk menjelaskan status kemiskinan rumah tangga sektor informal.

4) Ukuran ketepatan klasifikasi model

Ukuran ini untuk menilai kebaikan model dengan melihat kemampuan model dalam melakukan prediksi.

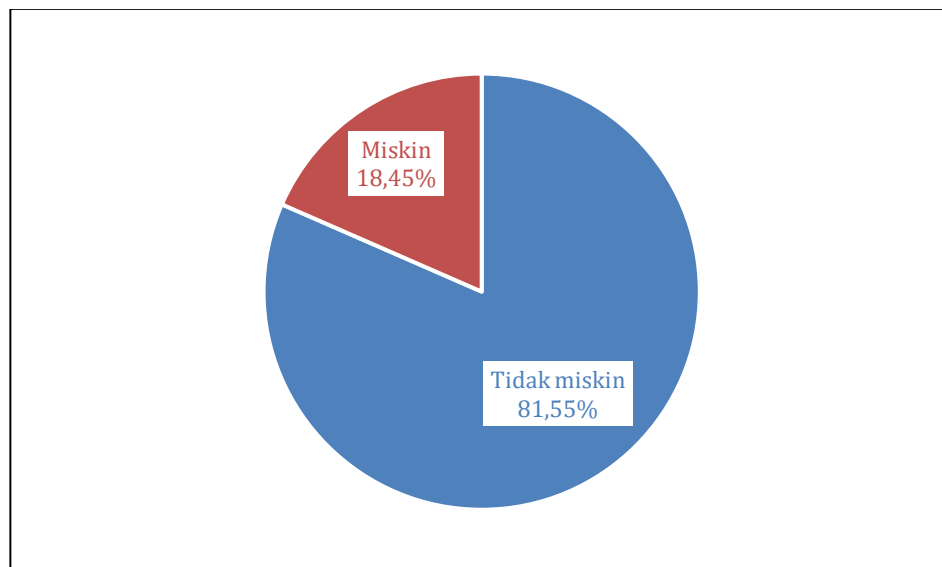
5) Interpretasi parameter

Interpretasi parameter dilakukan menggunakan rasio kecenderungan (*odds ratio*).

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Kemiskinan pada Rumah Tangga dengan KRT Bekerja di Sektor Informal

Berdasarkan hasil pengolahan, sebanyak 18,45 persen rumah tangga dengan KRT bekerja pada sektor informal di Provinsi NTT tergolong rumah tangga miskin. Hal ini berarti 1 dari 6 rumah tangga sektor informal di Provinsi NTT hidup di bawah garis kemiskinan. Gambaran kemiskinan pada rumah tangga sektor informal dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Persentase Rumah Tangga Miskin pada Sektor Informal di Provinsi NTT Tahun 2024

Jika dilihat berdasarkan karakteristik rumah tangga, persentase rumah tangga miskin sektor informal di Provinsi NTT lebih tinggi di perdesaan, rumah tangga dikepalai oleh laki-laki, KRT berusia kurang dari 60 tahun, jumlah ART 5 ke atas, pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT SMP ke bawah, lapangan usaha pekerjaan utama KRT di sektor pertanian, total jam kerja KRT kurang dari 35 jam per minggu, KRT tidak memiliki rekening tabungan, KRT tidak mengakses internet, serta rumah tangga tidak memiliki aset sama sekali. Gambaran kemiskinan pada rumah tangga dengan KRT bekerja di sektor informal disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Rumah Tangga Miskin pada Sektor Informal di Provinsi NTT Tahun 2024

Karakteristik rumah tangga	Kategori	Persentase total	Status miskin rumah tangga (persen)	
			Miskin	Tidak miskin
Klasifikasi wilayah	Perkotaan	16,50	8,21	91,79
	Perdesaan	83,50	20,47	39,53
Jenis kelamin KRT	Laki-laki	85,81	19,42	80,58
	Perempuan	14,19	12,56	87,44
Usia KRT	< 60 tahun	75,02	19,65	80,35
	60 tahun ke atas	24,98	14,83	85,17
Jumlah anggota rumah tangga (ART)	4 ke bawah	52,52	8,39	91,61
	5 ke atas	47,48	29,56	70,44
Pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT	SMP ke bawah	84,32	20,12	79,88
	SMA ke atas	15,68	9,46	90,54
Lapangan usaha pekerjaan utama KRT	Pertanian	75,12	20,73	79,27
	Non Pertanian	24,88	11,54	88,46
Jumlah jam kerja KRT seminggu	< 35 jam	32,34	21,17	78,83
	35 jam ke atas	67,66	17,15	82,85
Kepemilikan rekening tabungan KRT	Memiliki	49,24	14,70	85,30
	Tidak memiliki	50,76	22,08	77,92
Akses internet KRT	Ya	38,64	11,81	88,19
	Tidak	61,36	22,63	77,37
Kepemilikan aset rumah tangga	Memiliki	96,63	18,13	81,87
	Tidak memiliki	3,37	27,56	72,44

Faktor-faktor yang Memengaruhi Status Miskin Rumah Tangga dengan KRT Bekerja pada Sektor Informal di Provinsi NTT Tahun 2024

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik biner. Adapun tahapan-tahapan penyusunan model yang dilakukan antara lain uji simultan (uji G), uji parsial, dan uji kesesuaian model (*goodnes of fit test*).

Uji simultan (uji G)

Dalam pengujian ini, hipotesis yang digunakan antara lain:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_{10} = 0$ (tidak ada variabel penjelas yang berpengaruh terhadap status miskin rumah tangga sektor informal di Provinsi NTT tahun 2024.)

H_1 : minimal ada satu $\beta_j \neq 0$ (minimal ada satu variabel penjelas yang berpengaruh terhadap status miskin rumah tangga sektor informal di Provinsi NTT tahun 2024.).

Diperoleh nilai G sebesar 1.260,196, lebih besar dari $\chi^2_{(10)}$ ($\chi^2_{(10)} = 18,307$) atau p-value 0,000 lebih kecil dari α ($\alpha = 0,05$) yang berarti H_0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi 5 persen terdapat minimal satu variabel penjelas yang berpengaruh terhadap status miskin rumah tangga sektor informal di Provinsi NTT tahun 2024.

Uji Parsial (uji Wald)

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel penjelas terhadap status kemiskinan rumah tangga sektor informal, dilakukan uji signifikansi parameter parsial (uji Wald). Variabel penjelas signifikan jika *p-value* kurang dari α ($\alpha = 0,05$). Hasil uji parsial ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Parsial

Karakteristik rumah tangga	Koefisien	<i>Standard error</i>	<i>P-value</i>	<i>Odds ratio</i>
Klasifikasi wilayah (X_1)				
Perkotaan (<i>ref.</i>)				
Perdesaan	0,707	0,143	0,000*	2,028
Jenis kelamin KRT (X_2)				
Laki-laki (<i>ref.</i>)				
Perempuan	-0,149	0,094	0,115	0,862
Usia KRT (X_3)				
< 60 tahun (<i>ref.</i>)				
60 tahun ke atas	-0,437	0,077	0,000*	0,646
Jumlah ART (X_4)				
4 ke bawah (<i>ref.</i>)				
5 ke atas	1,804	0,065	0,000*	6,073
Pendidikan tertinggi KRT (X_5)				
SMA ke atas (<i>ref.</i>)				
SMP ke bawah	0,417	0,106	0,000*	1,517
Lapangan usaha pekerjaan utama KRT				
Non pertanian (<i>ref.</i>)				
Pertanian	0,232	0,087	0,008*	1,261
Jumlah jam kerja KRT seminggu (X_7)				
35 jam ke atas (<i>ref.</i>)				
< 35 jam	0,252	0,064	0,000*	1,287
Akses internet KRT (X_9)				
Ya (<i>ref.</i>)				
Tidak	0,641	0,073	0,000*	1,898
Kepemilikan rekening tabungan KRT				
Memiliki (<i>ref.</i>)				
Tidak memiliki	0,196	0,063	0,002*	1,217
Kepemilikan aset rumah tangga (X_{10})				
Memiliki (<i>ref.</i>)				
Tidak memiliki	0,332	0,145	0,022*	1,394
Intersep	-4,247	0,169	0,000*	0,014

Keterangan: *ref.* = kategori referensi

* = signifikan pada $\alpha = 5$ persen

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel di atas, diperoleh persamaan regresi logistik biner sebagai berikut.

$$\hat{g}(X) = -4,247 + 0,707X_1 - 0,149X_2 - 0,437X_3 + 1,804X_4 + 0,417X_5 + 0,232X_6 + 0,252X_7 + 0,196X_8 + 0,641X_9 + 0,332X_{10}$$

Uji Kesesuaian Model (Goodness of Fit Test)

Dalam pengujian ini, hipotesis yang digunakan antara lain:

H_0 : Model sesuai (tidak ada perbedaan hasil obeservasi dan hasil prediksi dari model)

H_1 : Model tidak sesuai (terdapat perbedaan hasil observasi dengna hasil prediksi dari model)

Diperoleh p-value sebesar 0,252, lebih besar dari α ($\alpha = 0,05$) yang berarti gagal tolak H_0 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi 5 persen model telah sesuai untuk menjelaskan status miskin rumah tangga sektor informal di Provinsi NTT.

Tabel Klasifikasi

Salah satu cara untuk menilai kebaikan model adalah dengan melihat kemampuan model dalam melakukan prediksi. *Cutpoint* optimum yang diperoleh melalui perhitungan indeks Youden sebesar 0,187. Berdasarkan *cutpoint* tersebut, diperoleh hasil prediksi model regresi logistik biner sebagai berikut.

Tabel 4. Ukuran Ketepatan Klasifikasi Model Regresi Logistik Biner

Aktual		Prediksi		Total
		Status miskin		
		Tidak miskin	Miskin	
Status miskin	Tidak miskin	5,649	1,937	7,586
	Miskin	481	1.083	1,564
Total		6,130	3,020	9,150
Akurasi = (1083+5649)/9150 =0,7357				
Sensitivitas = 1083/(481+1083) = 0.6925				
Spesifisitas = 5649/(5649+1937) = 0,7447				

Berdasarkan Tabel 4 di atas, nilai akurasi model secara keseluruhan sebesar 73,57 persen. Artinya, model mampu mengklasifikasikan rumah tangga sektor informal ke dalam kategori miskin dan tidak miskin dengan benar sebesar 73,57 persen. Sisanya diklasifikasikan salah oleh model. Nilai sensitivitas sebesar 69,25 persen menunjukkan kemampuan model untuk mengklasifikasikan rumah tangga sektor informal yang berstatus miskin ke dalam kategori yang sama. Sedangkan nilai spesifisitas sebesar 74,47

persen menunjukkan kemampuan model untuk mengklasifikasikan rumah tangga sektor informal yang berstatus tidak miskin ke dalam kategori yang sama.

Interpretasi Parameter Model

Berdasarkan hasil uji parsial pada Tabel 3, terdapat satu variabel yang secara statistik tidak signifikan berpengaruh terhadap status miskin rumah tangga dengan KRT bekerja pada sektor informal di Provinsi NTT yaitu jenis kelamin KRT. Sementara variabel-variabel lainnya seperti klasifikasi wilayah, usia KRT, jumlah ART, pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT, lapangan usaha pekerjaan utama KRT, jumlah jam kerja KRT dalam seminggu, akses internet KRT, kepemilikan rekening KRT, dan kepemilikan aset rumah tangga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status miskin rumah tangga sektor informal.

Jenis kelamin KRT tidak berpengaruh signifikan terhadap status miskin rumah tangga sektor informal di Provinsi NTT. Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Hutahaean dan Sitorus (2022) namun sejalan dengan hasil penelitian Rosmika (2021). Salah satu penyebab perempuan menjadi KRT di Provinsi NTT adalah karena suaminya merantau untuk bekerja di luar daerah. Pembiayaan kebutuhan sehari-hari rumah tangga ini selain dari ART yang bekerja juga mendapatkan transfer dari suami/famili yang bekerja di daerah lain. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024, persentase rumah tangga sektor informal dengan KRT perempuan yang pembiayaan terbesarnya berasal dari kiriman uang/barang sebesar 19,25 persen. Sementara pada rumah tangga sektor informal dengan KRT laki-laki hanya 2,17 persen.

Wilayah tempat tinggal signifikan berpengaruh terhadap status miskin rumah tangga sektor informal di Provinsi NTT. Rumah tangga sektor informal di perdesaan memiliki kecenderungan sebesar 2,028 kali untuk masuk dalam kategori miskin dibandingkan di wilayah perkotaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti Rini dan Sugiharti (2016) dan Rosmika (2021). Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang dialami oleh sebagian masyarakat perdesaan di Provinsi NTT seperti akses jalan yang buruk serta internet yang belum menjangkau semua desa. Sementara sektor informal mendominasi di perdesaan NTT. Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2024, sebanyak 23,85 persen desa/kelurahan di Provinsi NTT masih memiliki permukaan jalan terluas berupa kerikil, batu, tanah atau lainnya. Di samping itu, sekitar 16,52 persen desa/kelurahan belum memiliki akses internet 5G/4G/LTE.

Selanjutnya, usia KRT juga signifikan berpengaruh terhadap status miskin rumah tangga sektor informal di Provinsi NTT. Rumah tangga yang dikepalai seorang lansia (usia 60 tahun ke atas) memiliki kecenderungan sebesar 0,646 kali untuk menjadi miskin dibandingkan rumah tangga yang dikepalai non lansia (usia kurang dari 60 tahun). Dengan kata lain, kecenderungan menjadi miskin lebih tinggi pada rumah tangga dengan KRT non lansia. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rini dan Sugiharti (2016) yang menyatakan bahwa seiring bertambahnya usia KRT akan meningkatkan akumulasi aset yang dimiliki rumah tangga. Di samping itu, pembiayaan pada rumah

tangga lansia juga bisa diperoleh dari anak-anak yang sudah bekerja baik yang masih tinggal di rumah tangga tersebut ataupun yang sudah bekerja di daerah lain.

Jumlah ART dalam rumah tangga sangat signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan dalam rumah tangga tersebut. Rumah tangga sektor informal dengan jumlah ART lebih dari 4 memiliki kecenderungan sebesar 6,073 kali untuk menjadi miskin dibandingkan rumah tangga dengan jumlah ART 4 ke bawah. Semakin banyak muatan rumah tangga semakin banyak pula sumber daya yang dibutuhkan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan setiap anggotanya.

Tingkat pendidikan KRT signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan pada rumah tangga sektor informal di Provinsi NTT. Rumah tangga dengan KRT tamat SMP ke bawah memiliki kecenderungan untuk miskin sebesar 1,517 kali dibandingkan rumah tangga dengan KRT tamat SMA ke atas. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya seperti Rini dan Sugiharti (2016), Hutahaean dan Sitorus (2022), serta Pulungan dan Haryanto (2024) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan KRT, maka semakin rendah kecenderungan rumah tangga menjadi miskin. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi NTT harus sejalan dengan upaya peningkatan taraf pendidikan masyarakatnya.

Pulungan dan Haryanto (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa rumah tangga informal dengan KRT bekerja di sektor pertanian memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menjadi miskin. Sejalan dengan hasil tersebut, penelitian ini menemukan bahwa rumah tangga sektor informal dengan KRT bekerja pada sektor pertanian memiliki kecenderungan 1,261 kali untuk menjadi miskin dibandingkan sektor non pertanian. Hal ini karena banyak pekerja pada sektor pertanian di Provinsi NTT yang merupakan petani subsisten serta dilakukan secara tradisional sehingga produktivitasnya rendah. Di samping itu, sektor ini sangat rentan terhadap gejolak harga dan iklim serta tidak dilindungi oleh jaminan sosial.

Temuan lain dalam penelitian ini adalah jumlah jam kerja KRT signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan dalam rumah tangga sektor informal. Rumah tangga dengan KRT bekerja kurang dari 35 jam seminggu memiliki kecenderungan 1,287 kali menjadi miskin dibandingkan dengan KRT yang bekerja 35 jam ke atas. Temuan ini konsisten dengan penelitian Pulungan dan Haryanto (2024) yang menyatakan bahwa jumlah jam kerja berkaitan dengan pendapatan yang diterima pekerja. Mereka yang bekerja paruh waktu akan mendapatkan penghasilan yang lebih rendah dibandingkan pekerja penuh waktu.

Akses internet KRT juga signifikan memengaruhi status miskin rumah tangga sektor informal di Provinsi NTT. Rumah tangga dengan KRT tidak menggunakan internet memiliki kecenderungan 1,898 kali untuk menjadi miskin dibandingkan rumah tangga dengan KRT mengakses internet. Dengan akses teknologi digital, informasi mengenai kesempatan kerja, perubahan harga, bahkan peluang membuka usaha baru menjadi lebih cepat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Kepemilikan rekening tabungan signifikan berpengaruh terhadap status miskin rumah tangga sektor informal di Provinsi NTT. Rumah tangga dengan KRT tidak memiliki rekening tabungan di lembaga keuangan memiliki kecenderungan 1,217 kali untuk menjadi miskin dibandingkan rumah tangga dengan KRT memiliki rekening tabungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosmika (2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sektor keuangan akan memudahkan transaksi dan membuka peluang meningkatkan pendapatan. Dengan memiliki rekening tabungan, masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses berbagai layanan keuangan dan produk investasi.

Variabel terakhir yang signifikan mempengaruhi status kemiskinan rumah tangga sektor informal adalah kepemilikan aset. Rumah tangga yang tidak mempunyai aset memiliki kecenderungan 1,394 kali untuk menjadi rumah tangga miskin dibandingkan rumah tangga yang memiliki aset. Temuan ini sejalan dengan penelitian Iskandar dkk (2006) yang menyatakan bahwa keluarga yang memiliki aset lebih banyak cenderung lebih sejahtera dibandingkan dengan keluarga yang memiliki aset terbatas. Kepemilikan aset dalam rumah tangga merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga sektor informal di Provinsi NTT.

4. Simpulan dan Saran

Rumah tangga dengan KRT yang bekerja di sektor informal di Provinsi NTT memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap kemiskinan. Berdasarkan karakteristik rumah tangga, persentase rumah tangga miskin lebih tinggi di perdesaan, jumlah ART lebih dari empat orang, jenis kelamin KRT laki-laki, usia KRT kurang dari 60 tahun, KRT berpendidikan SMP ke bawah, KRT bekerja di sektor pertanian, jumlah jam kerja KRT dalam seminggu kurang dari 35 jam, KRT tidak mengakses internet, KRT tidak memiliki rekening tabungan, serta rumah tangga tidak memiliki aset. Faktor-faktor yang secara statistik signifikan berpengaruh terhadap status kemiskinan rumah tangga sektor informal di Provinsi NTT adalah klasifikasi wilayah tempat tinggal, jumlah ART, usia KRT, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT, lapangan usaha pekerjaan utama KRT, jumlah jam kerja KRT dalam seminggu, akses internet KRT, kepemilikan rekening tabungan KRT, dan kepemilikan aset rumah tangga.

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah yaitu perlu adanya percepatan pemerataan infrastruktur di perdesaan terutama jalan dan jaringan internet agar akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, dan pusat-pusat ekonomi menjadi lebih mudah. Selain itu, pemberdayaan UMKM di pedesaan perlu ditingkatkan untuk memperkuat daya saing terhadap produk-produk luar.

Pekerja sektor informal di NTT sangat rentan terhadap perubahan ekonomi dan iklim. Pemerintah perlu memperluas cakupan program perlindungan sosial terhadap pekerja pada sektor ini seperti jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan dan bantuan sosial. Akses terhadap pembiayaan juga perlu dipermudah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penyederhanaan persyaratan kredit, pengembangan lembaga

keuangan mikro dan jaminan kredit dari pemerintah daerah. Pemerintah juga perlu mendorong pengembangan sektor informal melalui berbagai kebijakan seperti keringanan pajak UMKM, penyederhanaan prosedur perizinan usaha, edukasi literasi keuangan, dan bantuan aset produktif untuk usaha.

Pada sektor pertanian, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang komprehensif termasuk menjaga stabilitas harga komoditas pertanian, memastikan target pasar, dan pemberdayaan petani. Mengingat Provinsi NTT sering dilanda wabah penyakit ternak, pemerintah perlu mempercepat vaksinasi ternak serta meningkatkan kapasitas layanan kesehatan hewan baik dari sisi tenaga kesehatan hewan maupun sarana pendukung lainnya.

Kerentanan rumah tangga informal di Provinsi NTT diperparah oleh banyaknya tanggungan serta rendahnya pendidikan KRT. Di samping itu, penyuluhan dan akses keluarga berencana (KB) masih harus ditingkatkan di NTT untuk menekan penambahan tanggungan keluarga. Khusus untuk pekerja informal dengan tingkat pendidikan rendah, berbagai program pemberdayaan bisa diterapkan seperti pelatihan keterampilan kerja praktis (tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi) misalnya operator mesin, pertukangan, dan sebagainya serta pelatihan kewirausahaan dasar misalnya tenun dan pembuatan furnitur.

Bagi peneliti selanjutnya, untuk penelitian yang serupa bisa ditambahkan karakteristik rumah tangga lain seperti jumlah ART yang bekerja, keberadaan ART yang bekerja di sektor formal, dan akses kredit.

Ethics Approval

Seluruh prosedur dalam penelitian ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika penelitian dan publisitas yang berlaku.

Conflict of Interest

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan terkait penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Badan Pusat Statistik. (2025). Profil Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- [2] Badan Pusat Statistik. (2025). *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan Nusa Tenggara Timur September 2024*. BPS
- [3] Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). *Statistik potensi desa Provinsi Nusa Tenggara Timur: Village potential statistics of Nusa Tenggara Timur Province (Vol. 3)*. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- [4] Chen, M.A. (2007). *Rethinking the informal economy: Linkages with the formal economy and the formal regulatory environment*. United Nations Departement of Economic and Social Affair.
- [5] Damanik, R., & Zebua, H.I. (2025). When informality meets poverty: vulnerability of informal workers in North Sumatra's rural and urban divide. *Jurnal Ketenagakerjaan Vol.20 No.1, 2025*.
- [6] Fields, G.S (2005). *A guide to multisector labor market models*. World Bank Sosial Protection Discussion Paper No. 0505.
- [7] Gunawan, A. (2012). *Employment asn the informal sector in Indonesia: Policy issues and options*. Asian Development Bank Institute
- [8] Hart, K. (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. *The Journal of Modern African Studies*, 11(1), 61-89. <https://www.jstor.org/stable/159873?read-now=1>
- [9] Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (2013). *Applied logistic regression* (3rd ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- [10] Hutahaeen, Y., & Sitorus, J. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Bekerja di Pulau Jawa. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 1165-1176.
- [11] International Labour Organization. (2018). *Women and men in the informal economy: A statistical picture (3rd ed.)*. International Labour Office.
- [12] Iskandar, Haryanto, Sumarwan, U., & Khomsan, A. (2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. *Info Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 131-141.
- [13] Pulungan, M.A., & Haryanto, T. (2024). Analisis kemiskinan rumah tangga sektor informal di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi Vol. 8 No. 1, 2024*
- [14] Rini, A. S., & Sugiharti, L. (2016). Determining factors of poverty in Indonesia: Household analysis. *JJET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan)*, 1(2), 80–95.
- [15] Rosmika, N. (2021). Kemiskinan rumah tangga sektor informal di Aceh. *Jurnal Ekombis*, 7(1), 65–74.
- [16] Setiawan, A., & Santoso, D. (2020). Analisis pengaruh sektor informal terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 25(2), 150-164.
- [17] Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia: Menggagas model jaminan sosial universal bidang ketenagakerjaan*. Alfabeta.
- [18] Suryahadi, A., & Hadiwidjaja, G. (2011). *The role of the informal sector in Indonesia's labor market*. The SMERU Research Institute